

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sebagai pelaksanaannya Gubernur Jawa Barat telah mengambil langkah-langkah kebijakan antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan perubahan struktur organisasi Pemerintahan Propinsi Jawa Barat melalui proses perampingan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat.
- b. Menetapkan tugas pokok dan fungsi kelembagaan organisasi perangkat daerah, dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Pengawasan Daerah Propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan kebijakan Gubernur Jawa Barat tersebut, maka organisasi Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat telah diubah dan digantikan, yaitu dengan dibentuknya Badan Pengawasan Daerah

(Bawasda) Propinsi Jawa Barat yang untuk selanjutnya disebut sebagai Bawasda Propinsi Jawa Barat. Badan yang baru dibentuk ini memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Tugas pokok Bawasda Propinsi Jawa Barat adalah melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kewenangan di Bidang Pengawasan sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- b. Bawasda Propinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan teknis pengawasan
 - Pelayanan penunjang Pemerintah Propinsi.

Dilihat dari besaran organisasi, maka Bawasda Propinsi Jawa Barat memiliki bentuk organisasi yang lebih ramping dibanding dengan organisasi terdahulu, tetapi kaya fungsi karena adanya tambahan-tambahan fungsi pengawasan yang baru.

Dibentuknya Bawasda Propinsi Jawa Barat dengan SOTK baru sebagai akibat dari pelaksanaan PP Nomor 84 Tahun 2000 yang ditindak lanjuti dengan Perda Nomor 16 Tahun 2000, menimbulkan permasalahan sebagai berikut :

- a. Beban kerja organisasi menjadi bertambah, akibat berkurangnya jumlah jabatan struktural, karena ada jabatan yang dihilangkan. Dari sebanyak 31 jabatan struktural, tinggal 23 jabatan struktural yang masih dipertahankan.
- b. Perubahan struktur organisasi mengakibatkan kinerja aparatur Bawasda Propinsi Jawa Barat dituntut untuk lebih baik, lebih meningkat dan lebih efektif dibanding waktu yang lalu.
- c. Pelimpahan beban kerja dari setiap jabatan yang dihilangkan menambah berat beban kerja kepada jabatan lain yang menerima pelimpahan.

Pelaksanaan tugas-tugas pengawasan oleh aparatur Bawasda Propinsi Jawa Barat, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kinerja aparatur, sedangkan kinerja aparatur itu sendiri akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan organisasi dan kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya penelaahan yang mendalam terhadap kinerja aparatur pemerintah, khususnya yang berada dalam ruang lingkup Bawasda Propinsi Jawa Barat.

Penelaahan yang mendalam terhadap kinerja aparatur pemerintah diperlukan berdasarkan pertimbangan :

1. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, fungsi pengawasan untuk menutupi berbagai kebocoran atau penyimpangan dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan oleh aparat, perlu lebih ditingkatkan agar

terbentuk organisasi pemerintahan yang sehat dalam berbagai aspek kegiatan penyelenggaraan pemerintahan (clean government).

2. Menjaga kredibilitas aparatur pemerintah agar tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan pemerintahan. Karena kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi organisasi pemerintah untuk mulai menggerakkan roda organisasi dalam upaya mencapai tujuan.
3. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan kehadiran aparatur pemerintah yang benar-benar memiliki motivasi dan tekad yang kuat untuk menjadi aparatur yang tangguh, sehat dan memiliki kualitas yang mampu memuaskan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Atas dasar uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Pengaruh Kebijakan Pimpinan Dalam Perubahan Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Di Bawasda Propinsi Jawa Barat.**

A.1. Identifikasi Masalah

Berlandaskan kepada latar belakang masalah, penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kebijakan (PP Nomor 84 Tahun 2000) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang harus dijalankan oleh Daerah (Propinsi, Kota/Kab) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan organisasi yang harus ditempuh oleh daerah. Daerah dengan sendirinya harus menyesuaikan kebijakannya dengan amanat yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut, yang dalam kenyataannya dapat memunculkan masalah karena perbedaan visi, aspirasi dan kebutuhan organisasi.
- b. Perubahan struktur organisasi dalam upaya merespon pelaksanaan Kebijakan memunculkan masalah pengaturan beban kerja organisasi untuk disalurkan secara tepat kepada unit-unit organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Organisasi yang ramping secara teknis akan bergerak lincah tetapi belum tentu efektif oleh karenanya diperlukan peningkatan kualitas organisasi yang dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja aparatur penggerak organisasi.
- c. Kinerja aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang bagaimanapun akan dipengaruhi oleh kebijakan organisasi. Adanya beban kerja yang baru dilimpahkan dari unit organisasi yang dihilangkan tentunya akan memunculkan masalah baru pula.

A.2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan kepada identifikasi masalah, maka masalah penelitian dibatasi kepada :

- a. Masalah pelaksanaan Kebijakan Pimpinan yang harus dijalankan dan Kinerja Aparatur Pemerintah, dengan focus masalah pada Pengaruh dari pelaksanaan Kebijakan Pimpinan (Gubernur Jawa Barat) berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 2000 terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Di Bawasda Propinsi Jawa Barat.
- b. Masalah Perubahan Struktur Organisasi dan Kinerja Aparatur Pemerintah, dengan focus masalah pada pengaruh Perubahan Struktur Organisasi (perampingan struktur organisasi) terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah di Bawasda Propinsi Jawa Barat.
- c. Masalah pelaksanaan Kebijakan Pimpinan, Perubahan Struktur Organisasi dan Kinerja Aparatur Pemerintah, dengan focus masalah Pengaruh pelaksanaan Kebijakan Pimpinan (Gubernur Jawa Barat) berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 2000 dan Perubahan Struktur Organisasi (perampingan struktur organisasi) terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah di Bawasda Propinsi Jawa Barat.

A.3. Perumusan Masalah

Dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Seberapa besarkah Pengaruh Kebijakan Pimpinan (Gubernur Jawa Barat) berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 2000 terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Di Bawasda Propinsi Jawa Barat ?
- b. Seberapa besarkah pengaruh Perubahan Struktur Organisasi (perampingan struktur organisasi) terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Di Bawasda Propinsi Jawa Barat ?
- c. Seberapa besarkah Pengaruh Kebijakan Pimpinan Dalam Perubahan Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Di Bawasda Propinsi Jawa Barat ?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

B.1. Tujuan Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami pengaruh Kebijakan Pimpinan (Gubernur Jawa Barat) berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 2000 dalam Perubahan Struktur Organisasi (perampingan struktur organisasi) terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah di Bawasda Propinsi Jawa Barat.

Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami tingkat Pengaruh dari :

- a. Kebijakan Pimpinan (Gubernur Jawa Barat) berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 2000 terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah di Bawasda Propinsi Jawa Barat.
- b. Perubahan Struktur Organisasi (perampingan struktur organisasi) terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah di Bawasda Propinsi Jawa Barat.
- c. Kebijakan Pimpinan (Gubernur Jawa Barat) berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 2000 dalam Perubahan Struktur Organisasi (perampingan struktur organisasi) terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah di Bawasda Propinsi Jawa Barat.

B.2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat digunakan untuk :

- a. Pengembangan teori ilmu pemerintahan, terutama yang terkait dengan kinerja aparatur pemerintah bidang pengawasan.
- b. Penerapan ilmu pemerintahan dalam upaya membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi aparatur pemerintah bidang pengawasan.